

INVASI ISRAEL KE JALUR GAZA DAN DUKUNGAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP BANGSA ARAB PALESTINA

Oleh: Dra. Harmiyati, MSi.

Pendahuluan

Invasi Israel ke Gaza pada 8 Juli 2014 telah mengakibatkan 230 orang warga Gaza meninggal (2/3 dari mereka adalah kaum perempuan, anak-anak, para manula, dan kaum difabel), 1770 orang mengalami luka-luka, dan puluhan ribu lainnya berada di lokasi pengungsian. (*Republika*, 19 Juli 2014, hal.7). Invasi Israel kali ini adalah yang ketiga kalinya. Invasi pertama pada 27 Desember 2008 sampai dengan 17 Januari 2009 (perang 22 hari), sedang invasi kedua pada Oktober 2012, dan yang terakhir adalah yang sedang berlangsung saat ini.

Sebenarnya invasi Israel tersebut tidak dapat disebut sebagai sebuah perang, karena menampilkan dua kekuatan yang tidak seimbang. Israel memiliki kekuatan tentara aktif sebesar 176.500 orang, sedang Arab Palestina hanya memiliki pasukan para militer sekitar 56.000 orang. Dari segi kapabilitas persenjataan, Israel memiliki sekitar 300 hulu ledak nuklir, sistem pertahanan udara iron dome, rudal arrow, rudal patriot, pesawat tempur, helikopter, kapal perang, dan kapal selam. Seding pejuang Palestina hanya bersenjatakan roket, bom, ranjau, mortar, dan berbagai senjata ringan. Dari segi teknologi, Israel memiliki satelit militer Ofeq dan Tec-STAR (Polaris), sedang para pejuang Hamas dan Jihad Islam hanya mengandalkan data Google Earth. (*Republika*, 18 Juli 2014, hal 6). dari deskripsi tersebut di atas lantas muncul pertanyaan: apa yang sesungguhnya mendasari invasi Israel ke Gaza pada tahun 2014 ini ?

Faktor Rekonsiliasi Hamas-Fatah

Invasi Israel ke Gaza, yang didasarkan pada alasan pembunuhan tiga remaja Israel di kota Hebron dan diduga dilakukan oleh pejuang Hamas, sesungguhnya hanya merupakan alasan pembenar (justifikasi) dari serangan tersebut, alasan sebenarnya adalah kegeraman dan rasa frustrasi Pemerintah Israel di bawah Benjamin Netanyahu terhadap adanya rekonsiliasi antara faksi Hamas dengan faksi Fatah yang pernah

berseteru sejak tahun 2007. Upaya rekonsiliasi ini telah membuyarkan angan Israel untuk terus mendikte Pemerintah Otoritas Palestina di bawah pemerintahan Mahmoud Abbas agar memenuhi kemauan Israel. Pemerintah Palestina di bawah payung PLO dengan didominasi faksi Fatah selama ini sangat tunduk pada kemauan Israel melalui perundingan-perundingan damai Palestina-Israel yang justru kontraproduktif karena merugikan pihak bangsa Arab Palestina. Sejak tercapainya kesepakatan damai Palestina-Israel dari tahun 1993 hingga saat ini, Israel selalu mengingkari hasil-hasil kesepakatan, bahkan sejak tercapainya kebuntuan negosiasi damai pada tahun 2010, Israel justru memanfaatkan momentum tersebut untuk memperluas pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Tepi Barat dan Jerusalem Timur, suatu wilayah yang diklaim sebagai wilayah Negara Palestina merdeka kelak. Sementara rekonsiliasi Hamas-Fatah dianggap akan membahayakan posisi keamanan Israel, karena faksi Hamas dikenal sebagai kelompok pejuang bersenjata yang gigih dan sangat tidak mempercayai segala perundingan damai dengan Israel, dan asumsi Hamas tersebut memang terbukti.

Rekonsiliasi antara faksi Hamas dan Fatah, yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan damai di Kairo, dengan dimediasi oleh Mesir, pada tanggal 4 Mei 2011 menyepakati dibentuknya pemerintahan teknokrasi yang berasal dari kedua kubu. Perdamaian internal Palestina ini merupakan prasyarat bagi terbentuknya Negara Palestina yang bersatu dan berdaulat, serta menjadi dasar bagi diakhirnya konflik dengan Israel. Rekonsiliasi internal Palestina ini bukan hanya didukung oleh Negara-Negara Arab melalui organisasi Liga Arab, tetapi juga didukung oleh Organisasi Uni Eropa dalam rangka mencapai solusi dua Negara, Palestina dan Israel.

Namun, Pemerintah Israel tetap bersikukuh, bahkan mengancam akan memutuskan aliran listrik dan air di wilayah Gaza, serta tidak akan

mencairkan uang milik Pemerintah Otoritas Palestina jika pemerintahan persatuan nasional terbentuk. Netanyahu bahkan mengutus mantan Menlu Israel, Tzipi Livni, juga Raja Yordania, Abdullah II, ke Ramallah untuk membujuk Mahmoud Abbas agar membatalkan rekonsiliasi internal, dan secepatnya memulai perundingan damai dengan Israel. Akan tetapi, rekonsiliasi internal Palestina yang dalam perkembangannya justru semakin solid ini telah membuat pemerintah Israel frustrasi, dan opsi terakhir untuk menghancurkan rekonsiliasi adalah dengan cara menghancurkan Hamas sebagai kendala utama agenda Zionis Israel.

Blokade Israel dan Reaksi Dunia

Upaya penghancuran kelompok Hamas oleh Israel bukan hanya dilakukan dengan cara serangan militer, tetap juga melalui blokade wilayah Jalur Gaza yang bertujuan menimbulkan dampak psikologis, politis, dan ekonomis bukan hanya bagi Hamas, tetapi juga bagi rakyat Arab Palestina secara keseluruhan di wilayah itu. Blokade Israel di Gaza, yang dimulai pasca penculikan seorang prajurit Israel, Gilad Shalit, pada tahun 2006 semakin diperketat pasca perpecahan Hamas-Fatah pada Juli 2007. Isolasi wilayah Gaza dengan cara mematikan aliran listrik, air, penghentian pasokan pangan dan bahan bakar di wilayah tersebut telah mengakibatkan kondisi kehidupan masyarakat di wilayah itu kian memburuk. Ibarat hidup di penjara terbesar di dunia, sekitar 1,5 juta orang warga Gaza tengah menunggu lonceng kematian di depan mata. Perlakuan Pemerintah Israel ini merupakan satu bentuk aksi genosida (pembasmian etnis) terhadap rakyat Arab Palestina di Gaza. Data Dana dan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menyebutkan bahwa sejak blockade Israel tahun 2007 telah mengakibatkan 45,2% penduduk Gaza menganggur, dan kondisi pertanian mereka merosot karena lahan-lahan pertanian milik warga Gaza dibuldoser oleh pihak tentara Israel, serta adanya larangan mengeksport hasil-hasil pertanian mereka. (<http://www.republika.co.id>)

Perilaku Pemerintah Israel dan tragedi kemanusiaan di Gaza telah menimbulkan respon negatif yang luar biasa di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Misi-misi bantuan kemanusiaan semacam MER-C

yang telah berhasil membangun Rumah Sakit Indonesia, di kawasan Beit Lahiya, Gaza Utara, International Solidarity Movement, Freedom Flotilla I&II, adalah beberapa contoh dari aksi-aksi kemanusiaan untuk Gaza. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini, sangat aktif ikut memperjuangkan nasib bangsa Arab Palestina melalui multitrack diplomacy, yaitu satu bentuk diplomasi melalui jalur resmi pemerintah (first track) dan jalur non-pemerintah (second track) yang melibatkan LSM, kelompok pengusaha, dan aktivis2 kemanusiaan lainnya. Dukungan nyata Pemerintah Indonesia diwujudkan melalui pemberian beasiswa bagi sekitar 1200 orang warga Palestina untuk menerap ilmu di Indonesia, menerima perwakilan Palestina dalam acara Bali Democracy Forum (BDF) untuk belajar tentang demokrasi, dan dukungan peningkatan kapasitas untuk Palestina di bidang pertanian, pariwisata, teknologi informasi dan komunikasi, serta light manufacturing. (Republika.co.id.,1-3-2014)

Penolakan terhadap Israel

Pemerintah dan masyarakat Indonesia nyata-nyata menolak keberadaan Israel sejak awal karena alasan normatif dan historis. Secara normatif, Negara RI menolak Israel karena negara zionis tersebut dibentuk berdasarkan penjajahan atau kolonialisme, dan ini bertentangan dengan alinea pertama Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan tentang pentingnya kemerdekaan dan menyerukan dihapuskannya penjajahan di seluruh dunia. Kolonialisme Yahudi tersebut dimulai sejak munculnya gerakan zionisme (zionisme politik) di bawah Theodore Herzl, yang dalam kongresnya (Kongres Zionis I) di Basel, Swiss, tahun 1897 bertekad untuk mendirikan 'rumah' Yahudi (*National Homeland*) di Palestina.

Berkat adanya lembaga-lembaga keuangan dan pendanaan Yahudi (*Jewish Colonial Trust Ltd., Jewish National Fund, dan Jewish Agency*), yang bertugas membeli tanah-tanah Bangsa Arab, secara berangsur-angsur orang-orang Yahudi dari seluruh dunia, terutama Yahudi Eropa (Yahudi Askhenazi) bermigrasi ke wilayah Palestina. Kedatangan mereka secara besar-besaran ditandai sejak munculnya Deklarasi Balfour 1917, yaitu surat dari James Arthur Balfour, menteri luar negeri Inggris waktu itu, kepada Lord Lionel Walter Rothchild, seorang

tokoh terkemuka zionis, yang berisi jaminan dan dukungan resmi pemerintah mandat Inggris atas terbentuknya suatu Negara Yahudi yang akan berkedudukan di Palestina. Deklarasi Balfour tersebut telah berdampak besar bagi gerakan zionisme dan menjadi pemicu bagi munculnya konflik antara Bangsa Arab Palestina yang telah mendiami wilayah tersebut sejak abad VII Masehi dengan para imigran Yahudi yang sejarah nenek moyangnya di wilayah itu sudah terhapus sejak penjajahan Romawi tahun 64-135 Masehi.

Dukungan Inggris yang begitu besar terhadap gerakan zionisme Yahudi disebabkan oleh adanya hubungan baik antara Pemerintah Inggris dengan tokoh-tokoh zionis, yang berhasil meyakinkan Pemerintah Inggris bahwa posisi Inggris akan semakin kuat di kawasan Timur Tengah bila wilayah Palestina berada di bawah dominasi Yahudi. Semula, para tokoh zionis ini berusaha mendekati Pemerintah Daulah Usmaniyah yang berkuasa di Palestina waktu itu (tahun 1517-1917), agar menyetujui dibentuknya suatu badan khusus untuk pemukiman Yahudi, tetapi usahanya ditolak. Pasca Perang Dunia I wilayah Palestina menjadi bagian dari pemerintah mandat Inggris, dan di bawah kekuasaan Inggris inilah cita-cita *national homeland* Yahudi terealisasi. (M.Amin Rais, 1989:177-243).

Akan tetapi, dengan tersulutnya konflik antara Arab Palestina dengan imigran Yahudi ini, pemerintah Inggris kemudian berusaha menentramkan Bangsa Arab Palestina dengan mengeluarkan Buku Putih Churchill (*Churchill White Paper*) 1922 yang isinya Inggris tidak bermaksud menjadikan wilayah Palestina sebagai Negara Yahudi. Dalam tahun 1929-1930 kembali Pemerintah Inggris mengirim *The Shaw and Hope Simpson Commissions* untuk menyelidiki sebab-sebab kerusuhan di Palestina. Hasil dari investigasi ini mengungkapkan bahwa Bangsa Arab Palestina merasa terganggu oleh pembelian tanah-tanah dari imigran Yahudi secara besar-besaran, mereka khawatir bahwa akhirnya mereka akan menjadi minoritas di negeri sendiri.

Konflik antara Bangsa Arab Palestina dan imigran Yahudi pun terus berlanjut sehingga untuk kedua kalinya pasca kerusuhan tahun 1936 Inggris mengutus tim investigasi di bawah *The Peel Royal Commissions* untuk mengetahui keadaan sesungguhnya di Palestina. Tim tersebut menyimpulkan bahwa konflik antara Arab dan

Yahudi adalah perselisihan antara “hak melawan hak”, dan perselisihan itu hanya dapat diselesaikan melalui pembagian Palestina. Inggris kemudian memilih penyelesaian bi-nasional, Palestina akan diberi kemerdekaan dalam tempo 10 tahun, sedang imigrasi Yahudi akan dibatasi sebanyak 75 ribu orang dalam kurun waktu lima tahun sehingga memungkinkan komunitas Yahudi menduduki sepertiga dari jumlah penduduk Palestina.

Tetapi peristiwa *holocaust*, yakni peristiwa pembantaian terhadap 6 juta orang Yahudi oleh Pemerintah Nazi Hitler di Jerman tahun 1939 telah menimbulkan gelombang simpati di kalangan pemerintah Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, termasuk Inggris, sehingga Pemerintah Inggris kembali mengubah kebijakannya dengan menghilangkan pembatasan imigran Yahudi. Kebijakan Inggris ini kemudian menimbulkan ketegangan antara negara-negara Arab yang bersimpati terhadap nasib Arab Palestina dengan pihak Barat. Melalui forum organisasi Liga Arab mereka memperingatkan pihak Inggris dan Amerika bahwa ide pembentukan negara zionis di Palestina akan menjadi ancaman bagi perdamaian di Timur Tengah.

Situasi kritis yang berkembang antara negara-negara Arab dengan pihak Barat di satu sisi, serta aksi-aksi teror yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok organisasi ekstremis zionis (*Stern Gang, Irgun Zvai Leumi, dan Haganah*) terhadap Inggris di sisi lain, membuat Pemerintah Inggris semakin terdesak. Untuk mengatasi itu, Pemerintah Inggris kemudian menyerahkan tanggungjawabnya kepada PBB. Majelis Umum PBB segera membentuk UNSCOP (*United Nations Special Committee on Palestine*) untuk mencari solusi masalah Palestina. Pada tanggal 29 Nopember 1947, melalui pemungutan suara, MU PBB mengeluarkan Resolusi Rencana Pembagian Palestina (*Partition Plan*) yang akan membagi wilayah Palestina menjadi Negara Arab, Negara Yahudi, dan kota Jerusalem di bawah perwalian PBB. Resolusi tersebut diterima baik oleh pihak zionis, tetapi ditentang keras oleh Negara-Negara Arab.

Akibat dari resolusi, pertikaian keras antara warga Arab dengan Yahudi semakin tak terhindarkan, apalagi menyusul pengumuman Pemerintah Inggris yang akan mengakhiri mandatnya di Palestina pada 15 Mei 1948.

Kelompok zionis kemudian berusaha mengamankan wilayah mereka, termasuk wilayah Arab yang ditinggal mengungsi (sejak pengumuman Rencana Partisi sebanyak 200 ribu warga Arab meninggalkan negaranya). Sebaliknya, komunitas Arab yang sudah lama berang mulai menyerang tempat-tempat pemukiman Yahudi. Sehari sebelum penarikan Pemerintah mandat Inggris, pada 14 Mei 1948 kaum zionis Yahudi secara resmi mengumumkan berdirinya Israel, yang segera dijawab dengan perang oleh sejumlah negara Arab. Peristiwa ini menandai dimulainya perang Arab-Israel pertama (1948-1949), dimana sebanyak 700 ribu warga Arab terusir dari tempat tinggalnya. Peristiwa pengusiran secara besar-besaran oleh Pemerintah Israel ini disebut peristiwa *nakbah*, yang mengakibatkan tercerai-berainya penduduk Arab Palestina ke sejumlah Negara Arab, terutama ke Lebanon, Mesir, Suriah, dan Yordania. Tanah-tanah warga Arab yang terusir kemudian disita oleh Pemerintah Israel melalui UU *Law of Return* 1949 dan UU *Absentee Property Law* 1950. Pencaplokan wilayah Arab Palestina secara keseluruhan oleh Israel berlanjut pasca Perang Arab-Israel tahun 1967 (Perang Enam Hari). Dalam peperangan itu Israel mendapat tambahan wilayah Gurun Sinai milik Mesir dan Dataran Tinggi Golan milik Suriah. Dengan demikian, wilayah Israel yang terbentuk saat ini adalah wilayah yang diperoleh dari hasil perang dan penyerobotan, dan berdasarkan hukum internasional bersifat ilegal. Di era modern inipun Israel tetap konsisten melaksanakan kebijakan penyerobotan dengan cara pengusiran dan penghancuran rumah-rumah warga Arab, terutama dalam rangka menganeksasi 60 % wilayah Tepi Barat dan seluruh Jerusalem.

Secara historis, pemerintah dan rakyat Indonesia mendukung bangsa Arab Palestina karena dalam sejarahnya pihak Palestina lah yang pertama kali memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia, yang diwakili oleh Syeikh Muhammad Al Husseini, seorang mufti besar Palestina. Dukungan tersebut bahkan dimulai setahun sebelum Soekarno-Hatta benar-benar memproklamasikan kemerdekaan RI. Pada 6 September 1944, melalui radio Berlin berbahasa Arab, Al Husseini memberikan ucapan selamat kepada seluruh dunia Islam bertepatan dengan pengakuan Jepang atas kemerdekaan

Indonesia. Selain itu, seorang saudagar kaya Palestina waktu itu, Muhammad Taher, bahkan secara spontan menyerahkan seluruh uangnya di Bank Arabia tanpa meminta tanda bukti untuk memenangkan perjuangan Indonesia. Setelah pengakuan Palestina, menyusul Mesir melalui dukungan kelompok Al Ikhwan Al Muslimun yang mendesak pemerintah Raja Farouk untuk mengakui kemerdekaan pemerintah RI pada 22 Maret 1946. Menyusul Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, Afghanistan, dan Liga Arab sebagai organisasi bersama Arab pada 18 November 1946. Kenyataan sejarah inilah, terutama kepada bangsa Arab Palestina, menjadi alasan historis mengapa kita harus mendukung nasib bangsa Arab Palestina untuk merdeka dan berdaulat dalam konsep *two state solution*. Semoga niat yang tulus dari seluruh rakyat Indonesia ini mendapat ridlo dari Allah SWT. Amin...3x Ya Robbal Aalamin.

Referensi:

- Rais, Amien, *Timur Tengah*, Jurusan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989.
- Republika*, 18 Juli 2014.
- _____, 19 Juli 2014.
- “Tiga kerjasama Penting Indonesia dan Palestina”, http://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/14/02/28/n1_pgti-tiga-kerja-sama-penting-indonesia-dan-palestina, diakses 1-3-2014.